



WALI KOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 10/E);
36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 106);
37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 14/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 46);

39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 108);
40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor .../...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.097.967.032.000,00 (satu triliun sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 254.141.714.400,00 (dua ratus lima puluh empat miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 102.506.770.000,00 (seratus dua miliar lima ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.012.701.000,00 (delapan belas miliar dua belas juta tujuh ratus satu ribu rupiah).

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.029.310.600,00 (enam belas miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 117.592.932.800,00 (seratus tujuh belas miliar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 102.506.770.000,00 (seratus dua miliar lima ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.375.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.922.220.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 21.936.250.000,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 24.109.700.000,00 (dua puluh empat miliar seratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 26.633.600.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.012.701.000,00 (delapan belas miliar dua belas juta tujuh ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.718.317.400,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.543.303.600,00 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu enam ratus rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 751.080.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.029.310.600,00 (enam belas miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha); dan
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.566.001.500,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh enam juta seribu lima ratus rupiah).

- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.177.685.900,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.285.623.200,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 117.592.932.800,00 (seratus tujuh belas miliar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Pendapatan Denda Retribusi Daerah; dan
 - f. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

- (4) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 128.290.300,00 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 142.852.500,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 112.709.790.000,00 (seratus dua belas miliar tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 843.825.317.600,00 (delapan ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pasal 10

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp. 747.542.927.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan; dan
- b. Insentif Fiskal.

- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 714.945.228.000,00 (tujuh ratus empat belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.597.699.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp. 96.282.390.600,00 (sembilan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 95.663.488.000,00 (sembilan puluh lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 618.902.600,00 (enam ratus delapan belas juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.232.967.032.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.057.523.335.128,00 (satu triliun lima puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 498.361.265.622,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 496.250.751.989,00 (empat ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 34.955.559.517,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 27.905.758.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 498.361.265.622,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 266.513.471.168,00 (dua ratus enam puluh enam miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 152.986.635.638,00 (seratus lima puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 59.105.719.536,00 (lima puluh sembilan miliar seratus lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.511.053.463,00 (lima belas miliar lima ratus sebelas juta lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.974.820.201,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus satu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 731.600.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 666.428.200,00 (enam ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 871.537.416,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam belas rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 496.250.751.989,00 (empat ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 101.012.885.098,00 (seratus satu miliar dua belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 192.580.836.870,00 (seratus sembilan puluh dua miliar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 44.083.430.389,00 (empat puluh empat miliar delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.039.396.398,00 (empat puluh empat miliar tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.074.391.260,00 (lima miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 16.721.353.790,00 (enam belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 92.738.458.184,00 (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 16

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMN.

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 34.955.559.517,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp. 5.160.600.000,00 (lima miliar seratus enam puluh juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp. 28.844.396.017,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh belas rupiah); dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp. 950.563.500,00 (sembilan ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 27.905.758.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp. 24.945.903.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah); dan

- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp. 2.959.855.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 173.443.696.872,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.310.214.640,00 (tiga belas miliar tiga ratus sepuluh juta dua ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 51.725.560.446,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 103.508.030.586,00 (seratus tiga miliar lima ratus delapan juta tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.210.626.200,00 (dua miliar dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 689.265.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 19

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), terdiri atas Belanja Modal Tanah Persil.

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.310.214.640,00 (tiga belas miliar tiga ratus sepuluh juta dua ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - c. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
 - g. Belanja Modal Komputer;

- h. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
 - i. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - j. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.657.709.768,00 (dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 184.100.000,00 (seratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.143.559.089,00 (lima miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 88.009.570,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
 - (7) Belanja Modal Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 950.359.260,00 (sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah).
 - (8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.095.918.943,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

- (9) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 20.360.000,00 (dua puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 962.550.000,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 765.836.610,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.256.811.400,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 51.725.560.446,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen; dan
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.597.910.646,00 (lima puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).

- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 121.649.800,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 103.508.030.586,00 (seratus tiga miliar lima ratus delapan juta tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.275.380.974,00 (lima puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.864.110.999,00 (empat puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.293.538.613,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.210.626.200,00 (dua miliar dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 79.365.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.131.261.200,00 (dua miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Pasal 24

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 689.265.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

Pasal 25

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 26

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 27

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp. 135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar rupiah), yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 28

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit Rp. 135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar rupiah).

Pasal 29

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
5. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
9. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10. Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
11. Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;

12. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
13. Lampiran VIII Rincian DBH-SDH Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas bumi Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
14. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
15. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah Perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

Pasal 30

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 13 Desember 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 13 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP 196704161993031015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 62/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepada Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	254.141.714.400,00
4.1.01	Pajak Daerah	102.506.770.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	6.900.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	6.590.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	6.590.000.000,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	60.000.000,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	60.000.000,00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	250.000.000,00
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	250.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	18.000.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	15.855.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	15.855.000.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.145.000.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.145.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.375.000.000,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	716.291.610,00
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	716.291.610,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	152.000.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	152.000.000,00
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	10.500.000,00
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	10.500.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	198.600.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	198.600.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	200.000.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	200.000.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	35.000.000,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	35.000.000,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	62.608.390,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	62.608.390,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.922.220.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.902.220.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.902.220.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	20.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	20.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	21.936.250.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	125.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	125.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	21.811.250.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	21.811.250.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	1.350.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	1.350.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	1.350.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	280.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	280.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	280.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	24.109.700.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	24.109.700.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	24.109.700.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	26.633.600.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	26.111.921.100,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	26.111.921.100,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	521.678.900,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	521.678.900,00
4.1.02	Retribusi Daerah	18.012.701.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.718.317.400,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	120.846.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	120.846.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.187.451.400,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.187.451.400,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	410.020.000,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	410.020.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	13.543.303.600,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.266.454.600,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.507.387.600,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	3.265.000.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	489.067.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	5.000.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.604.000.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	4.604.000.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	680.439.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	680.439.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	32.410.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	32.410.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	960.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	960.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	751.080.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.080.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.080.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	750.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	750.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.029.310.600,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	16.029.310.600,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.566.001.500,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.566.001.500,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.177.685.900,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.177.685.900,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	7.285.623.200,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	7.285.623.200,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	117.592.932.800,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	32.000.000,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	32.000.000,00
4.1.04.01.05.0054	Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya	32.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	80.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	80.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	80.000.000,00
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	128.290.300,00
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	128.290.300,00
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	128.290.300,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	4.500.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.500.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.500.000.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	142.852.500,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	142.852.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.13.02.0012	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	142.852.500,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	112.709.790.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	112.709.790.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	112.709.790.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	843.825.317.600,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	747.542.927.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	714.945.228.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	80.604.119.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.143.678.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	21.298.183.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	29.607.909.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	24.619.133.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	15.859.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	692.136.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	153.410.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.073.811.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	510.653.158.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	471.940.090.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.400.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	6.727.293.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	17.226.408.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	9.359.367.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	34.637.942.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	205.379.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.401.384.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.839.444.000,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	123.016.000,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	9.882.732.000,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	440.981.000,00
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	1.009.680.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	13.000.000.000,00
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	2.275.000.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	460.326.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	89.050.009.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	24.307.800.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	925.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	45.418.623.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	727.459.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.906.748.000,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	305.327.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.482.252.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	415.178.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	455.000.000,00
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	420.357.000,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	3.969.240.000,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	210.000.000,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	683.320.000,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	3.778.705.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	32.597.699.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	32.597.699.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	32.597.699.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.282.390.600,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	95.663.488.000,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	95.663.488.000,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	28.601.641.000,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.062.084.000,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.363.013.000,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	231.250.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	37.405.500.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	618.902.600,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	618.902.600,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	618.902.600,00
	Jumlah Pendapatan	1.097.967.032.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.057.523.335.128,00
5.1.01	Belanja Pegawai	498.361.265.622,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	266.513.471.168,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	196.825.167.557,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	166.865.160.305,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	29.960.007.252,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	16.813.577.878,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14.230.415.272,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.583.162.606,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.129.440.420,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.129.440.420,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.784.112.648,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.160.382.648,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.623.730.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.218.936.140,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.080.086.140,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	138.850.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.041.390.668,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.181.215.292,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.860.175.376,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	355.263.766,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	352.013.766,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	3.250.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	270.576.301,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	270.028.771,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	547.530,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	17.349.705.079,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	15.729.705.079,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1.620.000.000,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	636.000.000,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	480.000.000,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	156.000.000,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	2.040.000.000,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.680.000.000,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	360.000.000,00
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.049.300.711,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.049.300.711,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	152.986.635.638,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	64.441.097.803,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	56.402.607.893,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	8.038.489.910,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	300.000.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	300.000.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	88.245.537.835,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	85.583.895.355,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	2.661.642.480,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	59.105.719.536,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.202.777.570,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	281.260.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	810.475.872,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	54.484.728,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	78.811.020,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	882.658.250,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	28.700.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	11.480.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	981.732.700,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.073.175.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	43.753.635.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	43.753.635.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	505.500.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	505.500.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.896.236.966,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.402.062.080,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.118.457.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	375.717.886,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	790.500.000,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	51.600.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	738.900.000,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	1.513.070.000,00
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	1.513.070.000,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	444.000.000,00
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	444.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.511.053.463,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.062.469.597,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.062.469.597,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	73.236.240,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	73.236.240,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	89.222.280,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	89.222.280,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.179.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.179.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	119.150.850,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	119.150.850,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	315.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	315.000.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.668.839.996,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	89.199.996,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.440.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.200.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.574.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.045.600.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.045.600.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	316.260.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	316.260.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.974.820.201,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.468.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.468.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.214.240,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.214.240,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.726.088,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.726.088,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	120.711.672,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	120.711.672,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	40.200.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	40.200.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	120.000,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	120.000,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	360.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	360.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	717.547.390,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	48.020.000,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	138.373.929,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	9.302.271,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	13.455.540,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	150.697.750,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	4.900.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.960.000,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	167.612.900,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	183.225.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	929.592.811,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.750.000,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	168.075.000,00
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	20.501.000,00
5.1.01.05.11.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	3.053.000,00
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	8.000.000,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	387.766.096,00
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	216.146.215,00
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	31.356.000,00
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.620.500,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	47.750.000,00
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	75.000,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	37.500.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	731.600.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	530.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	530.000.000,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	666.428.200,00
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	666.428.200,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	666.428.200,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	871.537.416,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	871.537.416,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	871.537.416,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.250.751.989,00
5.1.02.01	Belanja Barang	101.012.885.098,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	98.459.314.942,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.516.848.067,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	548.952.140,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.601.168.900,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	25.721.500,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	826.869.607,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	27.131.500,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	11.674.574,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	304.708.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.788.661.136,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	35.240.040,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	101.608.775,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	28.181.352,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	189.473.376,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	1.494.060,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	160.000.710,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.511.627.224,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	111.888,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.084.314.565,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	194.778.140,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	738.513.871,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.770.345.966,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.953.458.662,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	507.664.922,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	36.458.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.569.326.096,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.733.065.106,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	8.799.782.895,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.345.306.200,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.289.234.404,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.157.235.516,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	48.037.400,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	21.892.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.634.080.045,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.518.385.318,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1.132.173.848,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	825.849.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.231.111.477,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	40.352.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	2.664.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	63.185.010,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	52.335.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.772.741.824,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.799.601.958,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	52.335.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	130.536.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	13.320.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.075.784.250,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	185.973.120,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	516.180.912,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	3.018.912,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	317.270.000,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	179.928.000,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	15.964.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.037.389.244,00
5.1.02.01.04.0023	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	121.291.000,00
5.1.02.01.04.0025	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	12.210.000,00
5.1.02.01.04.0035	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	175.037.660,00
5.1.02.01.04.0036	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	150.507.000,00
5.1.02.01.04.0066	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las	16.214.000,00
5.1.02.01.04.0104	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	17.453.640,00
5.1.02.01.04.0110	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	299.700.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	270.283.820,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	6.687.306,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	147.571.810,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	165.168,00
5.1.02.01.04.0322	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	50.000.000,00
5.1.02.01.04.0405	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.900.000,00
5.1.02.01.04.0406	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	55.500.000,00
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	9.400,00
5.1.02.01.04.0410	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	545.899.600,00
5.1.02.01.04.0411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	17.959.800,00
5.1.02.01.04.0450	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	2.009.100,00
5.1.02.01.04.0451	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	4.475.000,00
5.1.02.01.04.0463	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	52.229.940,00
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	82.285.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	192.580.836.870,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	140.857.258.315,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.426.392.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.363.935.657,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	1.800.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	30.600.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	219.500.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	18.282.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	37.780.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.992.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.711.124.200,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	344.821.256,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	125.385.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.080.000.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	633.600.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	976.800.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	661.550.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	168.000.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	392.000.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	531.510.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	188.954.200,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22.949.350.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	9.560.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.906.678.920,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	887.659.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	12.360.204.710,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.657.900.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	146.200.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	702.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	212.400.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.473.284.040,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.250.000,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	57.997.500,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	652.369.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.237.386.401,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	851.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	166.076.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	6.105.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	218.811.474,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	176.300.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.618.167.826,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	171.575.340,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	703.080.376,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	20.568.489.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	192.600.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.574.204.934,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	116.341.548,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	3.008.709.120,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	807.584.973,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	87.000.000,00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	2.847.400,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	12.174.091.440,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	255.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	33.956.633.000,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	32.020.040.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	369.702.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.495.920.000,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	70.971.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.663.793.856,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	10.400.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	21.720.146,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	676.594.695,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	268.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.474.454.506,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	92.739.865,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	41.418.200,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.180.000,00
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	77.286.444,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.044.792.477,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	229.674.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	624.937.977,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	6.600.000,00
5.1.02.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	18.300.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	99.280.500,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	66.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	132.600.883,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	4.665.550,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	26.813.100,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	101.122.233,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.691.214.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	15.000.000,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	115.000.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	73.500.000,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	595.000.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	104.842.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	20.202.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	404.390.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	30.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	273.280.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	60.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.495.939.800,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	300.000.000,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	128.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	35.020.500,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.141.290.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	4.314.750.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	313.379.300,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	173.500.000,00
5.1.02.02.09.0016	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	90.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	170.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	114.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	56.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.363.591.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.942.163.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	65.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	62.480.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	293.948.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	205.013.539,00
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	13.720.000,00
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	39.535.408,00
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.657.791,00
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	3.844.440,00
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	43.056.500,00
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1.400.000,00
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	560.000,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	47.889.400,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	52.350.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	44.083.430.389,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.733.755.348,00
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	25.000.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	112.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	120.967.900,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	3.501.000.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	230.900.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	32.094.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.196.052.666,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.002.949.160,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	585.832.500,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	276.465.500,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	106.800.000,00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	288.600,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.749.611.592,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	595.232.100,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	1.048.950,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	49.088.360,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	112.062.600,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	625.492.100,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.968.700.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	343.442.620,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	98.726.700,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.650.966.161,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.861.719.061,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	326.416.000,00
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	50.000.000,00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	202.000.000,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	579.168.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	696.500.000,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	247.663.100,00
5.1.02.03.03.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen	687.500.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.959.190.000,00
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	4.259.190.000,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	300.000.000,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	10.320.000.000,00
5.1.02.03.04.0075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	60.000.000,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	20.000.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	539.528.500,00
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	15.928.500,00
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	523.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	199.990.380,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	199.990.380,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	44.039.396.398,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.039.396.398,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.869.149.558,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.280.466.500,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.708.502.340,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	181.278.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.074.391.260,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.067.581.260,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	512.279.680,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.113.631.580,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	265.500.000,00
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	96.120.000,00
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	1.681.650.000,00
5.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	309.600.000,00
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	88.800.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.006.810.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	990.000.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	16.810.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.721.353.790,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.721.353.790,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.721.353.790,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	92.738.458.184,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	92.738.458.184,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	92.738.458.184,00
5.1.04	Belanja Subsidi	50.000.000,00
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	50.000.000,00
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	50.000.000,00
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	50.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	34.955.559.517,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.160.600.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	5.160.600.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	5.160.600.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	28.844.396.017,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28.245.296.017,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28.245.296.017,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	320.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	320.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	279.100.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	250.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	29.100.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	950.563.500,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	950.563.500,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	950.563.500,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	27.905.758.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	24.945.903.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	24.899.500.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	24.899.500.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	46.403.000,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	46.403.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.959.855.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.959.855.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.959.855.000,00
5.2	BELANJA MODAL	173.443.696.872,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	2.000.000.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	2.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.310.214.640,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.657.709.768,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.468.764.428,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	100.000.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.255.209.090,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	563.477.500,00
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	550.077.838,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	188.945.340,00
5.2.02.02.02.0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	28.520.340,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	160.425.000,00


KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	85.000.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	85.000.000,00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	85.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	184.100.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	184.100.000,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	184.100.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.143.559.089,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	3.924.895.609,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	93.980.370,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.830.915.239,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.218.663.480,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	167.410.200,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	772.434.240,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	260.590.620,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	18.228.420,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	88.009.570,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	59.597.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.944.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	34.052.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	20.601.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	28.412.570,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	28.412.570,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	950.359.260,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	940.088.730,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	940.088.730,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	10.270.530,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	10.270.530,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.095.918.943,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	931.067.663,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	885.779.893,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	45.287.770,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	164.851.280,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	161.797.280,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.054.000,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	20.360.000,00
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	20.360.000,00
5.2.02.14.01.0002	Belanja Modal Elektrik	20.360.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	962.550.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	962.550.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	940.350.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	22.200.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	100.000.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	100.000.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	100.000.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	765.836.610,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	765.836.610,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	765.836.610,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.256.811.400,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.256.811.400,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.256.811.400,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.725.560.446,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	51.597.910.646,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	51.597.910.646,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.596.757.000,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	368.187.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.479.414.600,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	24.500.000,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	446.140.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	14.518.642.000,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	850.000.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3.136.900.000,00
5.2.03.01.01.0015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan	695.354.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	11.090.200.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	13.159.836.046,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	3.231.980.000,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	6.000.000,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	6.000.000,00
5.2.03.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Peninggalan	6.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	121.649.800,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	121.649.800,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	121.649.800,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.508.030.586,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	56.275.380.974,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	41.885.738.848,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	27.517.528.178,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	14.368.210.670,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	14.389.642.126,00
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	14.389.642.126,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	40.864.110.999,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	39.334.450.000,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	39.334.450.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.528.660.999,00
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	1.528.660.999,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.000.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	75.000.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	75.000.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	75.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	6.293.538.613,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	6.293.538.613,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	6.293.538.613,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.210.626.200,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	79.365.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	79.365.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	79.365.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.131.261.200,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.131.261.200,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.131.261.200,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	689.265.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	689.265.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	689.265.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	100.000.000,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	200.000.000,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	389.265.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	1.232.967.032.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-135.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	135.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	135.000.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	135.000.000.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	135.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	135.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	135.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, SH., MM., M.Pd.